



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Kliping Digital Media Online

Wilayah & Tata Ruang

Senin, 23 Mei 2022



**Biro Humas, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan
Perpustakaan & Kearsipan
Jakarta, Bappenas
2022**

Daftar Isi

1. PAPUA DAN PEMERINTAHAN TEREALIENASI - *Media Online Kompas*
2. EKONOMI PAPUA DIPACU - *Media Online Bisnis Indonesia*
3. VILLAGE SDGs DATA PROVIDE EASE OF DETERMINING THE DIRECTION OF VILLAGE DEVELOPMENT - *Media Online The Jakarta Post*

Papua dan Pemerintahan Teralienasi

Vidhyandika D Perkasa

Peneliti Senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta

Situasi di Papua semakin suram dengan meningkatnya intensitas kekerasan dan konflik yang kian sulit diatasi.

Puluhan orang menjadi korban, baik pihak sipil, kelompok kriminal bersenjata (KKB)/Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), maupun aparat keamanan. KKB/TPNPB makin brutal menyerang fasilitas umum, seperti bandara di Ilaga dan dituduh membakar perumahan guru di Kabupaten Puncak. Kondisi di Papua kini berada dalam titik kritis.

Tak ada lagi kebijakan yang bisa 'memenangkan' masyarakat Papua sehingga instabilitas dan gejala sosial berlanjut menjadi ancaman nyata. Otonomi khusus (otsus) jilid dua yang diterapkan pemerintah sebagai obat mujarab penanganan kompleksitas di Papua kini kehilangan daya tariknya. Rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) juga dapat perlawanan keras dari masyarakat dan elite Papua.

Artikel ini mengulas berbagai problematika tata pemerintahan di Papua.

Alienasi

Peliknya situasi di Papua membuat pemerintah perlu melakukan proses reflektif kebijakan yang selama ini diterapkan. Dengan meminjam konsep teori kritis, ada berbagai macam wujud alienasi yang terjadi di Papua.

Pertama, pemerintah ibarat mengalami proses isolasi atau anomi antarpemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan karena 'minim' dukungan, khususnya dari elite Papua dan orang asli Papua (OAP). Dalam konteks ini, lemahnya solidaritas antara pemerintah pusat dan daerah, misalnya, dapat dilihat dari minimnya pernyataan empatik dari pemerintah daerah terkait berbagai aksi kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh TPNPB dan aparat keamanan.

Kedua, pemerintah pusat mengalami 'alienasi' kebijakan pada tingkat implementasi. Alienasi mengandung makna 'kehilangan kontrol' dan, yang terjadi, otsus jilid satu gagal menghasilkan *output* yang direncanakan. Bahkan, pemerintah cenderung lepas kontrol atas penyimpangan implementasinya sehingga dianggap melakukan proses 'pembiasaan'.

DOB juga merupakan wujud alienasi karena ditentang oleh berbagai kelompok masyarakat, khususnya elite Papua yang merasa akan dirugikan. Meski demikian, DOB dapat dilihat juga sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk melawan alienasi dan memenangkan kembali 'loyalitas' dari elite lokal Papua yang

didasari kepentingan ekonomi ataupun politik.

Ketiga, secara eksternal alienasi juga dimaknai sebagai ketidakberdayaan (*powerlessness*) pemerintah terhadap aksi kekerasan yang dilakukan KKB/TPNPB. Strategi keamanan pemerintah teralienasi karena tidak mendapat dukungan dari aktor lokal di Papua. Secara internal, sering terjadi tumpang-tindih atau kontradiksi program lintas kementerian, serta minimnya koordinasi yang melemahkan sinergitas lintas aktor dalam menangani masalah Papua.

Keempat, pemerintah daerah, representasi kultural orang Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan OAP juga mengalami alienasi hak dan kewajibannya. Otsus, baik jilid 1 maupun 2, menjelaskan otoritas pemerintah daerah, DPRP, dan MRP yang ditugaskan mengurus tata pemerintahan dan pembangunan di Papua. Kenyataannya, hak dan kewajiban mereka 'dikebiri'.

Anekdot 'kepala dilepas, tetapi ekor dipegang' menggambarkan hambatan pemerintah daerah dan MRP dalam menerapkan klausul-klausul otsus sesuai kewenangannya. Berbagai kebijakan yang 'mem-by-pass' peran DPRP dan MRP, seperti pemekaran dan dibatalkannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta pembentukan partai politik lokal, merupakan contoh alienasi ini. Lebih dari itu, sebagian dari OAP juga teralienasi dari proses dan hasil pembangunan. Intinya, mereka semua juga tak berdaya menghadapi kebijakan dari pusat yang diterapkan secara 'sepihak'.

Akar masalah

Tidak terlalu sulit mengidentifikasi sumber alienasi dalam konteks di Papua. Ada produk historis yang mendasari sejarah panjang gejala di Papua yang diakibatkan oleh masalah rekognisi atau pengakuan dan representasi. Rekognisi dan representasi adalah elemen penting dari strategi dialog. OAP telah mengalami apa yang disebut Taylor (1994)[2] sebagai *misrecognition* atau *nonrecognition* dalam berbagai wacana dan pencarian solusi yang terkait Papua.

Tak adanya rekognisi merupakan bentuk penindasan, 'memerjatkan eksistensi' seseorang dengan cara manipulatif, menyimpang, serta mereduksi eksistensi manusia dari haknya. Ada berbagai alasan mengapa terjadi *'nonrecognition'* terhadap OAP. Pertama, konstruksi perbedaan OAP secara fisik jika dibandingkan dengan orang-orang Indonesia lainnya, biasanya ditandai dengan perbedaan warna kulit dan bentuk rambut. Karena OAP dianggap 'liyan', akibatnya kekerasan dan diskriminasi direproduksi melalui perbedaan kultural.

Kedua, konstruksi sosio-kultural yang



HERYUNANTO

menempatkan OAP sebagai lapisan masyarakat terbelakang, bodoh, dan tak beradab sehingga 'tak layak' diajak dialog dan setara dengan lapisan masyarakat lain karena dianggap tak mampu.

Ketiga, berkaitan dengan alasan kedua, ada konstruksi sosio-politik yang ingin menempatkan OAP sebagai entitas masyarakat yang inferior yang mengarah ke rasisme. Seorang generasi muda Papua pernah mengatakan pendapatnya soal rasisme, yang menurut dia dibangun dengan motivasi ekonomi dan politik yang kuat. Sarana ini ditujukan menciptakan rasa rendah diri dan tak percaya diri agar orang Papua tidak 'memberontak' ketika 'kekuatan luar' mengeksploitasi provinsi tersebut. Rasisme dikonstruksikan untuk menghindari dari kompetisi atau persaingan dan biasanya diikuti dengan tidak adanya pengakuan akan kapasitas dari OAP.

Selain itu, representasi juga merupakan masalah serius di Papua. Ada dua dimensi dari representasi. Pertama, OAP dianggap tak mampu merepresentasikan diri sendiri. Mengacu Spivak (2010)[3], mereka dianggap kelompok *sub-altern* atau bagian dari lapisan masyarakat yang marjinal yang tidak boleh membentuk tindakan atau aksi yang bisa mendangatkan rekognisi untuk memperkuat identitas mereka.

OAP dianggap tak mampu mengidentifikasi keperluan pembangunan sehingga 'orang luar' perlu merepresentasikan kepentingan OAP. Dampaknya fatal karena tak sesuai dengan keperluan OAP. Akibatnya, narasi pembangunan Papua ditanggapi sinis dan skeptis, termasuk rencana pemekaran Papua yang sering ditanyakan untuk kepentingan siapa.

Proses representasi ini kian mengalienasi OAP di tanah kelahirannya sendiri. Meski melibatkan kelompok masyarakat yang marjinal, posisi *sub-altern* tak bersifat statis. Ada proses transformasi dengan membentuk aliansi antar-OAP ataupun elite Papua untuk 'melawan' hegemoni kekuasaan yang selama ini memarjinalkan mereka. Ini terlihat dari resistensi yang dilakukan berbagai pihak di Papua yang menentang kebijakan pemerintah.

Kedua, representasi sering dijadikan polemik dalam mencari solusi Papua. OAP menganggap mereka tak pernah diajak berdialog, sedangkan pemerintah pusat membela diri bahwa sudah mengundang representasi dari Papua.

Sementara mencari orang yang bisa merepresentasikan kepentingan OAP adalah suatu hal pelik karena fragmentasi kepentingan lokal sering kali beririsan dengan garis suku dan etnis yang beragam. Pemerintah perlu dengan bijak mengakomodasi berbagai macam 'representasi' dari OAP walaupun harus melibatkan pertemuan dengan frekuensi yang intensif dan berdurasi panjang demi menjunjung rasa keadilan.

Proyeksi ke depan

Dari uraian tersebut, apa proyeksi masa depan Papua? Pertama, pemerintah seharusnya tak berpuas diri dan hanya bersandar pada masalah kedaulatan Papua, yang diakui negara-negara lain berdasarkan sejarah integrasi Papua, yang masih sarat polemik. Sebab, 'intervensi asing', khususnya PBB, sangat mungkin terjadi, apalagi dengan kian maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM.

Kedua, jika pemerintah pusat dan daerah masing-masing menjalankan 'otritasnya' dengan tak solid, potensi konflik diametrikal bisa terjadi dan memperparah rasa saling tak percaya, seperti ketika pemerintah daerah Papua mengundang perwakilan dari Rusia untuk membangun Badan Pusat Antarktika di Papua. Tindakan ini dianggap mengambil alih tupoksi pemerintah pusat dalam melakukan lobi dengan negara lain.

Dari kompleksitas permasalahan tersebut, alienasi tata pemerintahan hanya bisa diatasi apabila ada perbaikan upaya membangun aspek rekognisi dan representasi secara mendasar dan serius dengan seluruh elemen masyarakat di Papua. Rekognisi dan representasi intinya menghargai suara OAP dan mendudukkannya secara setara. Pemerintah perlu membuka ruang publik seluas-luasnya bagi setiap elemen OAP dan elite lokal, termasuk memfasilitasi dialog untuk mengontestasikan kebijakan yang mengundang polemik. Upaya ini diharapkan dapat mendukung ke arah perbaikan kondisi di Papua yang semakin kritis dan teralienasi secara multidimensional.

| DAERAH OTONOMI BARU |

EKONOMI PAPUA DIPACU

Bisnis, JAKARTA — Pembentukan daerah otonomi baru di Bumi Cendrawasih merupakan aspirasi masyarakat Papua yang telah diperjuangkan puluhan tahun. Tujuannya, untuk mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Akbar Evandio
lakbacevandio@bisnis.com

Hal tersebut terungkap dalam audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/5).

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

"Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden," katanya, dalam keterangan yang disampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/5).

Menurutnya, pertemuannya dengan Kepala Negara bertujuan untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Pada beleid tersebut, lanjutnya, mengatur daerah otonomi baru, khusus

untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah.

Mathius menambahkan rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

"Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago," katanya.

Dia menjelaskan aspirasi tersebut didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Mathius menambahkan daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

"Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu

tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat," jelasnya.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial pada kuartal I/2022 tertinggi terjadi di Maluku dan Papua. Kendati, dari sisi porsi ke ekonomi nasional masih rendah yang hanya 2,58%.

"Maluku dan Papua tumbuhnya cukup impresif, 10,75%," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (9/5).

Pada akhir April, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Pemerintah terbuka untuk menampung usulan atau masukan terkait rencana pembentukan DOB Papua. "Jangan mendengar satu suara, tetapi mengabaikan suara yang lain," katanya saat ditemui *Bisnis*, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (26/4).

Menurutnya, sikap pro-kontra yang terjadi dalam proses pemekaran di satu daerah merupakan hal wajar. Namun, yang terpenting adalah tidak terjadi kekerasan akibat proses pemekaran wilayah ini. ■

Village SDGs data provide ease of determining the direction of village development

A report by Ivanovich Agusta/ Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration

There is no denying that Law No. 6, 2014 on villages has opened the door for development. Villages across Indonesia have been realizing their respective development plans, especially since 2015, when the village funds started to be disbursed. As of 2021, the government has transferred Rp 400.1 trillion (US\$27,200,495.22) worth of village funds and an additional Rp 68 trillion will be transferred by the end of 2022.

With such huge amount of funds having been transferred and having directly entered the village treasury account, an intriguing question is: How effectively and efficiently have the village funds, and the entire budget for the Village Budgets (APBDes), been used?

Minister of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration, Abdul Halim Iskandar, explained that since 2020, village development has been directed toward achieving SDGs Desa (Village SDGs).

For the last two years, the echo of SDGs has increasingly amplified in Indonesia via the theme of SDGs Desa. How have villages developed and what achievements have they made as of now? What plans has the government mapped out to implement village development plans for the middle term?

Ivanovich Agusta: *Why do you focus on SDGs Desa?*

A Halim Iskandar: Law No. 6, 2014 on villages, starting with article 6, contains village development; village area; development of village-owned companies; and village cooperation, development and empowerment. In relation to this, President Joko "Jokowi" Widodo mandated that village development should benefit all villagers, particularly those in the categories of poor and extremely poor. This should cover all village residents; there is nothing better than the SDGs adage: No one left behind. Much less so, Indonesia has ratified it through the Presidential Regulation No. 59, 2017 on the acceleration of SDGs. All I did was localize the diction, explanation and logos of the goals to make it easily acceptable to village residents.

Do SDGs Desa correspond to the Pancasila values?

I have already studied it. The major goal of Pancasila is living in the country as a good citizen. SDGs Desa contains activities significant to implementing Pancasila values. The 18th goals of the SDGs Desa, Dynamic Village Institutions and Adaptive Village Culture, which include the role of religious figures in promoting *gotong royong* (mutual cooperation) and development, clearly implement the first *sila* (principle): believe in one God.

The first goal of the SDGs Desa, Village without Poverty, corresponds to the second principle: just and civilized humanity. The Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration is drawing up the agenda, Village with Pancasila Culture, in which crucial activities are conducted to achieve the targets of SDGs Desa.

Will the achievements of SDGs Desa support the success of both Indonesian and global SDGs?

Certainly! Because in terms of details of the targets, SDGs Desa is similar to Indonesia's SDGs and global SDGs. For example, extreme poverty alleviation in villages is drawn up based on a similar method, using national and global measurements calculated from the income and spending under the

global poverty line, as much as Rp 12,000 per capita per day. By using the same method, performance in terms of poverty reduction in villages in accordance with the first goal of SDGs Desa will certainly correspond to the calculation of the national and global poverty decline.

What has the government done to implement the direction of the SDGs Desa policy?

In accordance with Permendes No. 21, 2020, village development starts from data entry, followed by implementation and ends with evaluation. That's why in 2021, the update of SDGs Desa data entry was conducted participatorily. All data is owned by the village -- the village has full rights to the data -- only the village head and the village secretary can have access to the data by name, by address. The supra-village can only have access to the data recap. As many as 59,094 villages have collected data regarding 88,298,703 villagers; 24,472,319 families; and 319,390 neighbourhood associations.

What benefits will a village reap after collecting SDGs Desa data?

The algorithm of Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration processes data into methods of achieving the targets of SDGs Desa. Currently, with regard to the targets, SDGs Desa has achieved 45.86 points.

The most important thing is that now, points of weaknesses and strengths can be revealed in detail. At the national level, a superior village is the seventh goal of the SDGs Desa -- that is, Clean and Renewable Energy Village -- and the 16th goal of Village of Peace and Justice is related to efforts to maintain social sustainability around the village.

What other benefits can villages reap?

The algorithm of Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration immediately provides the draft of detailed policy recommendations with up to 222 kinds of activities in accordance with the targets of the number of village developments.

Data on the existing issues are available, as well as the targets of achieving solutions from year to year until 2030 and the recommendations of annual implementation up to 2030, until all of the targets of the SDGs Desa are completely achieved by 2030. It can be said now that in just one click, villages can study their profile, issues and activity plans until 2030. What the villages should do is simply make joint decisions in village deliberations and then carry them out. Surely, development can run effectively and efficiently. It is easy, is it not?